



# KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/97/RB.04/2020  
Lampiran : 2 Berkas  
Hal : Surat Pemberitahuan Evaluasi RB dan SAKIP 2020.

15 Juli 2020

Yth. **Sekretaris Jenderal, Sekretaris  
Kementerian/Lembaga, Sekretaris Utama, dan  
Sekretaris Daerah** (Terlampir)

di  
tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, kami akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Instansi Pemerintah dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada bulan **Agustus-September 2020**. (jadwal menyusul)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan agar saudara dapat menyiapkan beberapa hal sebagai berikut:

## 1. Evaluasi Reformasi Birokrasi

- a. Mengisi serta mengirimkan LKE RB Manual (format excel) serta link atau tautan bukti dukung (dalam bentuk *google drive*) ke email [asdepwilsaturb@gmail.com](mailto:asdepwilsaturb@gmail.com) **paling lambat tanggal 20 Juli 2020** (Jika terdapat perubahan pada LKE RB Manual yang pernah dikirimkan sebelumnya) termasuk bagi Instansi Pemerintah yang telah mengisi PMPRB secara *Online*
- b. Membuat bahan paparan RB di level Pusat dan di level Unit Kerja (minimal 10 unit kerja Eselon I atau Unit Kerja/OPD sesuai yang disubmit di PMPRB *Online*). Poin-poin yang harus disajikan dalam bahan paparan sebagai berikut:
  - 1) Proses bisnis (proses bisnis utama dan juga penjabaran kinerja) dan hubungannya antar unit serta dengan *stakeholder*
  - 2) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya
  - 3) Progres *reform* yang telah dilakukan (keadaan *before-after*)
  - 4) Implementasi RB terkait dengan kondisi pandemi *covid-19*

## 2. Evaluasi SAKIP

- a. Melengkapi dan mengupload dokumen SAKIP terbaru di aplikasi e-SAKIP Reviu Menpan yaitu:

**1) Kementerian/ Lembaga**

Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, Laporan Kinerja, Renja/RKT, Laporan Hasil Evaluasi Internal, *cascading* kinerja dan dokumen lain terkait SAKIP (Kementerian/ Lembaga dan Unit Kerja)

**2) Pemerintah Daerah**

RPJMD, Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, Laporan Kinerja, Renja/RKT, Laporan Hasil Evaluasi Internal, *cascading* kinerja dan dokumen lain terkait SAKIP (**Pemerintah Daerah dan OPD**)

- b. Membuat paparan *progress* SAKIP terkait tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya;
- c. Memberikan akses pada aplikasi manajemen kinerja **jika ada** (*username* dan *password*) instansi

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan *social distancing*, metode evaluasi kali ini akan dilaksanakan melalui *desk evaluation* dan diskusi melalui *video conference*. Tim evaluator akan mengambil beberapa unit kerja eselon I atau OPD sebagai *sample* dan dilakukan evaluasi melalui *video conference (zoom)*, Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nararia (085328026199), Nabila (087722538877), Hasyati (081271209594), dan Arif Budiawan P (085398844888).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Pt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan  
Pengawasan



**Jufri Rahman**

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lampiran I

Nomor : B/ 97 /RB.04/2020

Tanggal : 15 Juli 2020

No	Kementerian/Lembaga
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3	Kementerian Luar Negeri
4	Kementerian Pertahanan
5	Lembaga Administrasi Negara
6	Lembaga Ketahanan Nasional
7	Arsip Nasional Republik Indonesia
8	Badan Intelijen Negara
9	Badan Keamanan Laut
10	Badan Kepegawaian Negara
11	Badan Narkotika Nasional
12	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
13	Badan Siber dan Sandi Negara
14	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
15	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
16	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
17	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum
19	Komisi Aparatur Sipil Negara
20	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
21	Ombudsman Republik Indonesia
22	Televisi Republik Indonesia
23	Radio Republik Indonesia

## PEMERINTAH DAERAH

### 1. Provinsi Aceh

1. Kota Subulussalam
2. Kota Sabang
3. Kota Lhokseumawe
4. Kota Langsa
5. Kota Banda Aceh
6. Kabupaten Aceh Timur
7. Kabupaten Aceh Barat Daya
8. Kabupaten Bireun
9. Kabupaten Aceh Tamiang
10. Kabupaten Gayo Lues
11. Kabupaten Aceh Besar
12. Kabupaten Pidie
13. Kabupaten Aceh Tengah
14. Kabupaten Aceh Utara
15. Kabupaten Bener Meriah
16. Kabupaten Pidie Jaya
17. Kabupaten Aceh Singkil
18. Kabupaten Aceh Barat
19. Kabupaten Aceh Jaya
20. Kabupaten Aceh Selatan
21. Kabupaten Aceh Tenggara
22. Kabupaten Simeuleu
23. Kabupaten Nagan Raya

### 2. Provinsi Sumatera Utara

1. Kota Pematang Siantar
2. Kota Padang Sidempuan
3. Kota Binjai
4. Kota Medan
5. Kota Gunungsitoli
6. Kota Tebing Tinggi
7. Kota Tanjung Balai
8. Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Kabupaten Nias Barat
10. Kabupaten Batu Bara
11. Kabupaten Simalungun
12. Kabupaten Karo
13. Kabupaten Nias Utara
14. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
15. Kabupaten Padang Lawas Utara
16. Kabupaten Mandailing Natal
17. Kabupaten Dairi
18. Kabupaten Tapanuli Selatan
19. Kabupaten Tapanuli Utara
20. Kabupaten Labuhanbatu Utara
21. Kabupaten Deli Serdang
22. Kabupaten Labuhan Batu
23. Kabupaten Humbang Hasundutan
24. Kabupaten Langkat
25. Kabupaten Nias
26. Kabupaten Pakpak Bharat
27. Kabupaten Samosir
28. Kabupaten Serdang Bedagai
29. Kabupaten Nias Selatan
30. Kabupaten Sibolga
31. Kabupaten Asahan
32. Kabupaten Padang Lawas
33. Kabupaten Toba Samosir

**3. Provinsi Sumatera Barat**

1. Kota Padang Panjang
2. Kota Sawahlunto
3. Kota Solok
4. Kota Bukittinggi
5. Kota Payakumbuh
6. Kota Padang
7. Kota Pariaman
8. Kabupaten Pasaman Barat
9. Kabupaten Solok Selatan
10. Kabupaten Limapuluh Kota
11. Kabupaten Kepulauan Mentawai
12. Kabupaten Dharmasraya
13. Kabupaten Solok
14. Kabupaten Pesisir Selatan
15. Kabupaten Tanah Datar
16. Kabupaten Agam
17. Kabupaten Padang Pariaman
18. Kabupaten Pasaman
19. Kabupaten Sijunjung

**5. Provinsi Kepulauan Riau**

1. Kota Tanjung Pinang
2. Kota Batam
3. Kabupaten Bintan
4. Kabupaten Karimun
5. Kabupaten Natuna
6. Kabupaten Kepulauan Anambas
7. Kabupaten Lingga

**7. Provinsi Bengkulu**

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Kaur
3. Kabupaten Mukomuko
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Bengkulu Tengah
6. Kabupaten Seluma
7. Kabupaten Bengkulu Selatan
8. Kabupaten Lebong
9. Kabupaten Rejang Lebong
10. Kabupaten Kepahiang

**4. Provinsi Riau**

1. Kota Dumai
2. Kota Pekanbaru
3. Kabupaten Indragiri Hilir
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Kuantan Singingi
6. Kabupaten Indragiri Hulu
7. Kabupaten Bengkalis
8. Kabupaten Rokan Hilir
9. Kabupaten Siak
10. Kabupaten Kepulauan Meranti
11. Kabupaten Kampar
12. Kabupaten Rokan Hulu

**6. Provinsi Jambi**

1. Kota Jambi
2. Kota Sungai Penuh
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Kabupaten Sarolangun
5. Kabupaten Kerinci
6. Kabupaten Bungo
7. Kabupaten Merangin
8. Kabupaten Tebo
9. Kabupaten Batanghari
10. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
11. Kabupaten Muaro Jambi

**8. Provinsi Banten**

1. Kota Tangerang Selatan
2. Kota Tangerang
3. Kota Cilegon
4. Kota Serang
5. Kabupaten Tangerang
6. Kabupaten Pandeglang
7. Kabupaten Lebak
8. Kabupaten Serang